

**KEBERADAAN FASILITAS MENURUT AKTIVITAS
DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LAMPULO, BANDA ACEH**

*Existence of Facilities by Activity in Lampulo Coastal Fishing Port,
Banda Aceh*

Oleh:

Ramziah An Najah^{1*}, Ernani Lubis², Retno Muningsgar²

¹ Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

² Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor

* Korespondensi: ramziahannajah@gmail.com

Diterima: 4 Januari 2012; Disetujui: 30 Maret 2012

ABSTRACT

Lampulo Coastal Fishing Port is not working optimally after the 2004 tsunami. A total of 9,563 units boats without motor, outboard boats and inboard boats were damaged by the tsunami, including the PPP Lampulo, 30 Fish Landing Base (PPI), ice plant, cold storage, Fish/Shrimp Seed Center Office, and the fish market. This study aimed to obtain information about the existence and condition of facilities in the PPP Lampulo, Banda Aceh; determining the level of existence, needs, and facility conditions to support their activities; and determining the ratio between the existence and needs of the facilities. The case study method was applied in this research with scoping on existence, needs, and facility conditions and the ratio between the existence and the need for facilities to support activities in the PPP Lampulo. Data were analyzed by descriptive statistical approach. The result showed that, in general, the existence and condition of facilities in supporting the activities of the PPP Lampulo had been going well. The ratio between the existing facilities toward the should exist facilities, namely on the vital facilities 1:1,12 (good), significant 1:1 (very good), and complement 1:1,43 (good) and this indicated that all activities in the PPP Lampulo had already been going properly.

Key words: Banda Aceh, fishing ports, PPP Lampulo, the facilities

ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo merupakan pelabuhan perikanan pantai (PPP) yang belum berupaya secara optimal setelah tsunami. Sebanyak 9.563 unit perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor hancur/hilang/rusak akibat tsunami, termasuk juga PPP Lampulo, 30 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), pabrik es, *cold storage*, Balai Benih Ikan/Balai Benih Udang, dan Pasar Ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan dan kondisi fasilitas yang terdapat di PPP Lampulo; menentukan tingkat keberadaan, kebutuhan, dan kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitasnya; serta menentukan rasio antara keberadaan dan kebutuhan fasilitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang melingkupi keberadaan, kebutuhan, dan kondisi fasilitas serta rasio antara keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo. Analisis yang dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan statistik. Secara umum keberadaan dan kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo telah berjalan dengan baik. Perolehan rasio antara fasilitas yang ada terhadap fasilitas yang seharusnya ada, yaitu: pada kelompok fasilitas vital 1:1,12 (*baik*), penting 1:1 (*baik*)

sekali), dan pelengkap 1:1,43 (*baik*). Hal ini mengindikasikan bahwa segala aktivitas di PPP Lampulo sudah dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Banda Aceh, pelabuhan perikanan, PPP Lampulo, fasilitas

PENDAHULUAN

Keberhasilan operasional pelabuhan perikanan tidak terlepas dari semua faktor-faktor pendukung yang ada, salah satunya adalah tersedianya fasilitas di pelabuhan perikanan. Fasilitas-fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Banyak pelabuhan tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga kurang melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Lubis (2006) menyatakan bahwa terlaksana atau tidaknya fungsi-fungsi pelabuhan perikanan secara optimal, akan mengindikasikan tingkat keberhasilan pengelolaan suatu pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan dengan keberadaan berbagai fasilitas yang dimilikinya merupakan jembatan bagi terlaksananya segala aktivitas pendaratan, perdagangan, dan pendistribusian produksi ke daerah konsumen. Oleh karena itu, keberadaan dan kondisi fasilitas sangat perlu diperhatikan agar aktivitas yang terdapat di pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan baik.

Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, sektor perikanan merupakan salah satu tonggak ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam. Sektor ini telah menyumbangkan 6,5 persen dari Pendapatan Daerah bernilai 1,59 triliun pada tahun 2004 (Dinas Perikanan dan Kelautan NAD 2005). Potensi produksi perikanan tangkap mencapai 120.209 ton/tahun sementara perikanan berskala tradisional mencapai 5.454 ton/tahun pada tahun 2003 (Dinas Perikanan dan Kelautan NAD 2004).

Gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, telah menghancurkan sebagian besar wilayah Nanggroe Aceh Darussalam terutama wilayah pesisir. Ini berarti suatu indikasi bahwa sektor kelautan dan perikanan mengalami kerusakan yang paling parah. Indikasi tersebut antara lain ditunjukkan oleh beberapa dampak yaitu: dari 1.660 km panjang garis pantai, 800 km dilanda gelombang. Selain itu diperkirakan jumlah armada perikanan beserta peralatannya mulai dari perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor berbagai ukuran sebanyak 9.563 unit hancur/hilang akibat tsunami, pelabuhan perikanan seperti Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo, 30 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), pabrik es, *cold storage*, Balai Benih Ikan/Balai Benih Udang, dan Pasar Ikan yang tersebar di seluruh Aceh, hancur/rusak/hilang terimbas tsunami.

Pasca tsunami tahun 2004, pemerintah telah membangun kembali Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo. Namun karena masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan serta masih kurangnya pelayanan yang diberikan maka pelabuhan ini belum berfungsi secara optimal. Kegiatan operasional akan berjalan dengan sempurna, bila ditunjang oleh keberadaan fasilitas dan pelayanan yang baik dari pihak pengelola pelabuhan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai keberadaan fasilitas menurut aktivitas di PPP Lampulo, Banda Aceh. Penelitian tentang hal tersebut di PPP Lampulo belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi telah dilakukan penelitian mengenai analisis kepuasan nelayan terhadap pelayanan tempat pendaratan ikan (TPI) di pelabuhan ini (Bahri 2004).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: mendapatkan informasi tentang keberadaan dan kondisi fasilitas yang terdapat di PPP Lampulo; menentukan tingkat keberadaan, kebutuhan, dan kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo; dan menentukan rasio keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo, Banda Aceh. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi/bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pihak pelabuhan, dan pihak terkait untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan, kebutuhan, dan kondisi fasilitas di PPP Lampulo, Banda Aceh.

METODE

Penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo, Banda Aceh pada bulan Mei 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus tentang keberadaan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo. Aspek-aspek yang diteliti yaitu fasilitas-fasilitas dan aktivitas di PPP Lampulo.

Keberadaan fasilitas yang diteliti dalam menunjang aktivitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo dilakukan terhadap 24 fasilitas yang didasarkan pada Lubis *et. al.* (2005) dan terbagi menjadi fasilitas vital, fasilitas penting dan fasilitas pelengkap.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung

di lokasi penelitian; dan wawancara dengan pengisian kuisioner. Pengambilan sampel atau responden dilakukan secara *purposive sampling* yang mewakili tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, seperti UPT PPP Lampulo, Perum Prasarana Lampulo, Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh; dan BPS Banda Aceh.

Analisis Keberadaan dan Kondisi Fasilitas di PPP Lampulo

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya seluruh fasilitas beserta kondisi fasilitas tersebut, baik fasilitas vital, penting, dan fasilitas pelengkap yang ada di PPP Lampulo.

Keberadaan fasilitas di PPP Lampulo

Analisis dilakukan dengan menggunakan tabel yang menunjukkan penetapan jumlah fasilitas dalam bentuk sistematis. Jumlah seluruh fasilitas adalah 24 yang terbagi atas fasilitas vital yang berjumlah 9, fasilitas penting berjumlah 5 dan fasilitas pelengkap berjumlah 10. Masing-masing jumlah per kelompok fasilitas ini akan terbagi menjadi lima kelompok kategori yang telah ditetapkan. Perolehan kategori didasarkan pada banyaknya jumlah fasilitas yang ada atau tidak ada dalam masing-masing kelompok tersebut. Penentuan kategori ini untuk menganalisis keberadaan (ada atau tidak ada) fasilitas di PPP Lampulo berdasarkan dari kelompok fasilitas tersebut (Gambar 1).

Selain bentuk skema, dalam mendukung analisis pembagian jumlah fasilitas per kategori diperlihatkan juga bentuk deskripsi visual. Hal ini agar dapat membandingkan secara langsung jumlah fasilitas yang telah ditetapkan per kategori dan jumlah fasilitas yang diperoleh per kelompok fasilitas yang diamati di PPP Lampulo.

Kondisi fasilitas di PPP Lampulo

Dalam menganalisis kondisi dari ke-24 fasilitas digunakan tabel dengan indikasi penentuan kondisi *layak pakai, melampaui kapasitas, dan tidak dapat digunakan*. Hal ini dikaitkan dengan luas bangunan fasilitas yang disesuaikan dengan penggunaannya dan kondisi fisik bangunan secara nyata yang diamati langsung di PPP Lampulo.

Pada Gambar 2 disajikan penetapan interval persentase kondisi fasilitas yang berlaku untuk semua kelompok fasilitas. Persentase yang diperoleh per kelompok fasilitas akan menentukan kategori penilaian. Kategori dan

interval persentase kondisi fasilitas adalah sama untuk semua kelompok fasilitas.

Gambar 3 menampilkan grafik yang dapat memperjelas pembagian interval persentase kondisi fasilitas per kategori untuk masing-masing kelompok fasilitas. Berdasarkan grafik ini juga dapat dibandingkan secara langsung persentase kondisi fasilitas yang diperoleh per kelompok fasilitas yang diamati di PPP Lampulo.

Analisis Keberadaan dan Kebutuhan Fasilitas dalam Menunjang Aktivitas PPP Lampulo

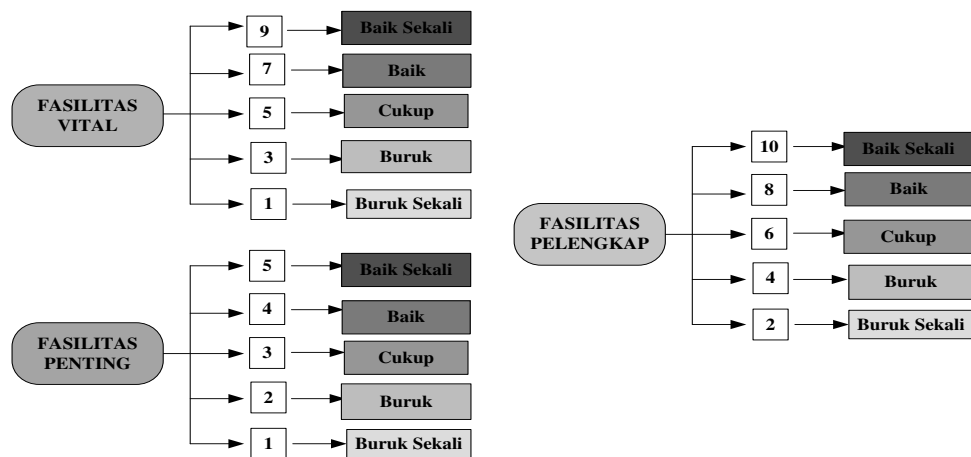
Keberadaan dan kebutuhan fasilitas untuk menunjang aktivitas PPP Lampulo

Analisis keberadaan dilakukan dengan mentabulasi fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada dan ada, sedangkan analisis kebutuhan yaitu dengan mentabulasi fasilitas yang ada dan diperlukan (ADP), ada namun belum diperlukan (ANBP), belum ada namun diperlukan (BANP), dan belum ada namun belum diperlukan (BANBP) dalam menunjang aktivitas (pendaratan, penanganan, pengolahan ikan, pemasaran, pemeliharaan dan perbaikan, administrasi dan penyuluhan, serta penyaluran perbekalan) di PPP Lampulo.

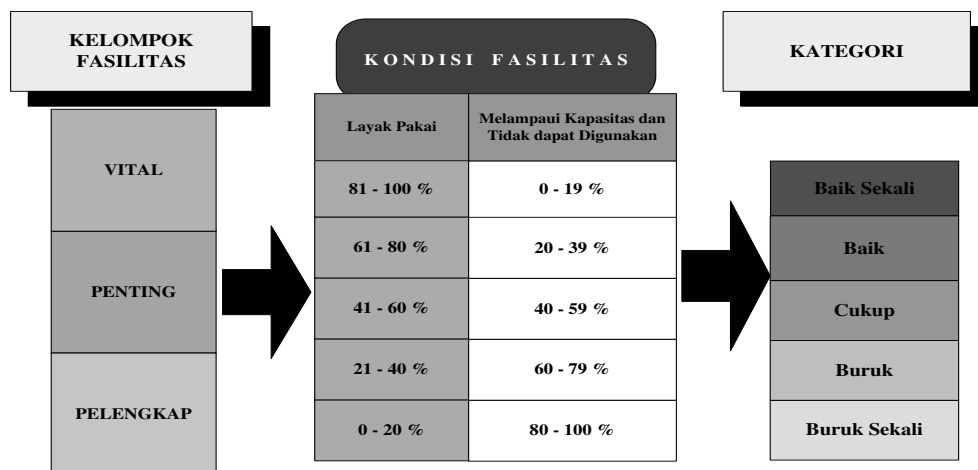
Gambar 4 menunjukkan kategori penilaian pada jumlah per kelompok fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo. Banyaknya kategori penilaian disesuaikan dengan jumlah fasilitas yang seharusnya ada dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo.

Pada kebutuhan fasilitas yang ada namun belum diperlukan (ANBP) tidak dimasukkan kedalam acuan utama dengan kebutuhan fasilitas belum ada namun diperlukan (BANP). Sementara jika kebutuhan fasilitas BANP dan ANBP memiliki persentase yang besar, hal ini mengindikasikan bahwa banyak aktivitas di PPP Lampulo yang berjalan kurang baik. Hal-hal inilah yang menjadi dasar pengelompokan kebutuhan fasilitas, yakni ADP dan BANBP; serta ANBP dan BANP. Penetapan (perkiraan) interval persentase kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo berlaku untuk semua kelompok fasilitas (vital, penting, pelengkap) seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

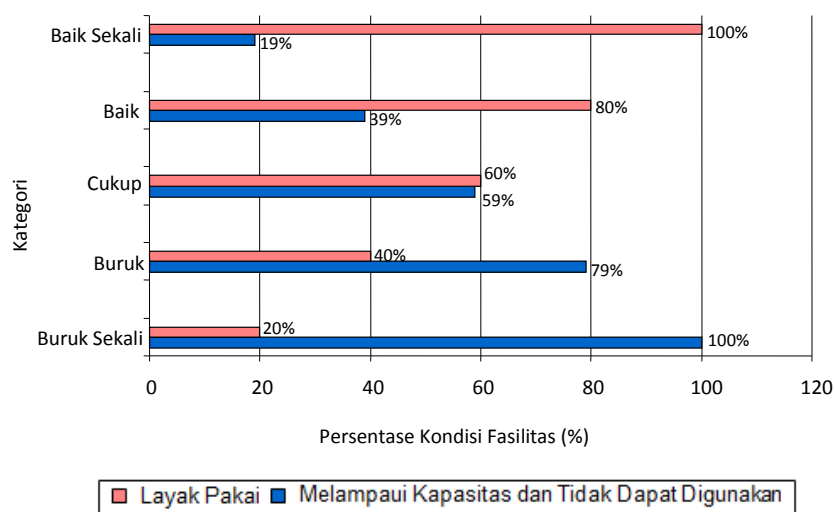
Gambar 6 merupakan pembagian kategori yang akan memperjelas pembagian interval persentase (perkiraan) kebutuhan fasilitas per kategori untuk masing-masing kelompok sehingga dapat membandingkan langsung dengan persentase pada kebutuhan fasilitas



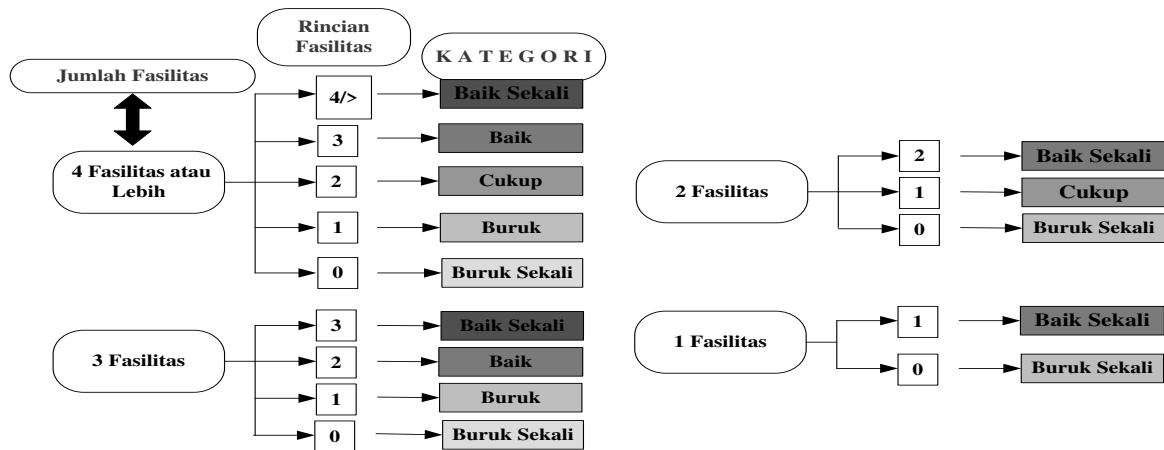
Gambar 1 Skema jumlah per kelompok fasilitas per kategori yang telah ditetapkan (Novianti, 2008)



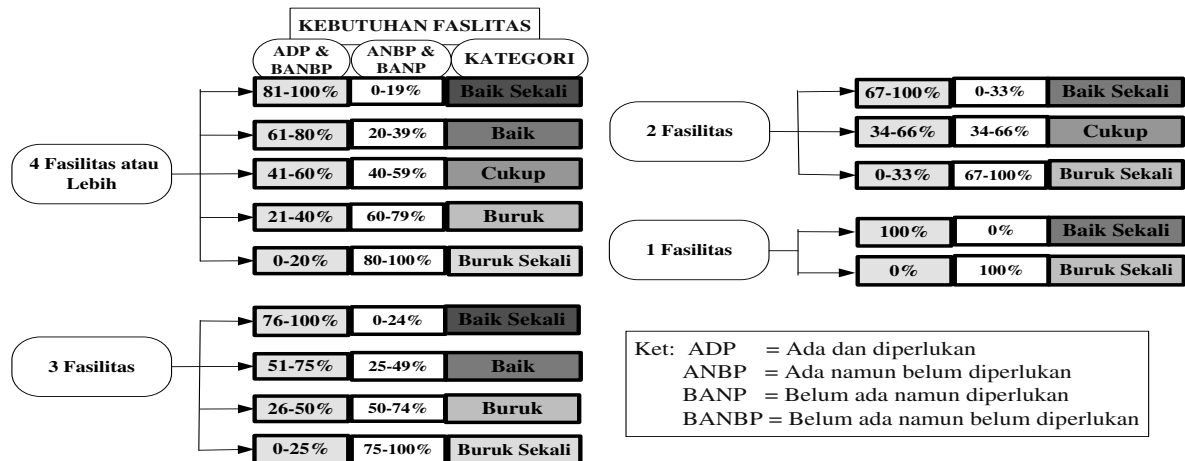
Gambar 2 Skema pembagian interval persentase kondisi fasilitas per kategori untuk masing-masing kelompok fasilitas yang telah ditetapkan (Novianti, 2008)



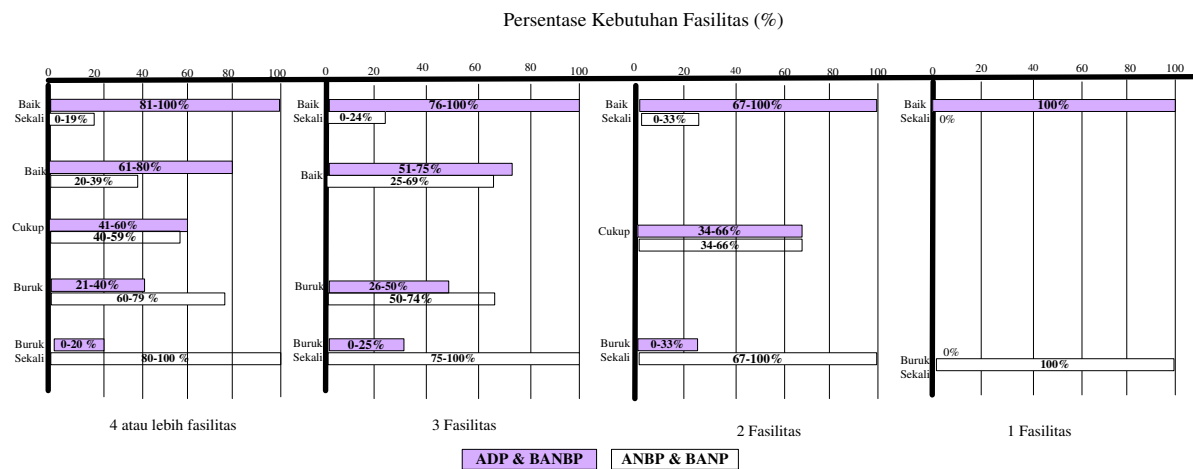
Gambar 3 Grafik pembagian interval persentase kondisi fasilitas per kategori yang telah ditetapkan untuk seluruh kelompok fasilitas (Novianti, 2008)



Gambar 4 Pembagian kategori keberadaan fasilitas yang telah ditetapkan dengan jumlah fasilitas (perkiraan) seharusnya ada yang akan diperoleh di PPP Lampulo



Gambar 5 Pembagian kategori kebutuhan fasilitas yang telah ditetapkan dengan interval persentase (perkiraan) yang akan diperoleh di PPP Lampulo



Gambar 6 Pembagian kategori kebutuhan fasilitas yang telah ditetapkan dengan interval persentase (perkiraan) yang akan diperoleh di PPP Lampulo

yang diperoleh per kelompok fasilitas (yang telah diamati secara langsung di PPP Lampulo.

Kondisi fasilitas dalam menunjang per aktivitas

Pada analisis kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas memiliki analisis yang sama dengan analisis kebutuhan fasilitas di PPP Lampulo. Menurut Novianti (2008) bahwa acuan utama dalam memberikan kategori penilaian untuk kondisi fasilitas adalah kondisi *layak pakai*. Jika persentase pada kondisi fasilitas *layak pakai* besar dapat diindikasikan bahwa fasilitas di PPP Lampulo telah melakukan fungsinya dengan baik. Sebaliknya jika kondisi fasilitas yang telah melampaui kapasitas dan yang tidak dapat digunakan persentasenya besar maka dapat diindikasikan bahwa fasilitas kurang berjalan baik sehingga diperlukan penambahan jenis dan kapasitas fasilitas serta perbaikannya.

Penentuan rasio keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang seluruh aktivitas

Kebutuhan fasilitas belum ada namun belum diperlukan (BANBP) tidak dibandingkan dengan fasilitas yang seharusnya ada karena perolehan persentase yang besar atau rendah tidak berpengaruh terhadap penilaian apapun. Rasio dari masing-masing kelompok fasilitas yang diperoleh akan menentukan kategori yang diberikan dalam hal keberadaan dan kebutuhan seluruh fasilitas dalam menunjang seluruh aktivitas di PPP Lampulo. Pada analisis ini, rasio yang diperoleh yaitu dengan membandingkan komponen-komponen seperti pada Tabel 1.

Secara keseluruhan, fasilitas yang terdapat di PPP Lampulo beserta kebutuhannya dapat diketahui dengan membuat matriks keberadaan dan kebutuhan fasilitas seperti disajikan pada Tabel 2. Tabel matriks ini akan menjelaskan secara keseluruhan fasilitas yang telah ada dan tidak ada beserta kebutuhan fasilitas tersebut di PPP Lampulo dan menurut Novianti (2008), pada tabel ini juga akan memperlihatkan kebutuhan fasilitas mana yang menjadi prioritas untuk direalisasikan keberadaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan dan Kondisi

Keberadaan dan kondisi fasilitas berdasarkan fasilitas vital, penting, dan pelengkap di PPP Lampulo di sampaikan pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 9 fasilitas vital yang seharusnya

ada, PPP Lampulo sudah memiliki 8 fasilitas vital atau 88,89%.

Fasilitas vital di PPP Lampulo sudah hampir terpenuhi. Fasilitas yang tidak dimiliki adalah sistem rambu-rambu (sarana bantu navigasi pelayaran). Hal ini dikarenakan fasilitas rambu-rambu navigasi yang ada sudah rusak akibat tsunami dan belum terealisasinya pengadaannya pasca tsunami. Fasilitas rambu-rambu harus segera direalisasikan untuk keselamatan pelayaran. Ketiadaan salah satu fasilitas vital sudah seharusnya diwujudkan agar PPP Lampulo dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.

Fasilitas penting di PPP Lampulo telah dimiliki seluruhnya, persentasenya mencapai 100% dan semua fasilitas penting tersebut telah berfungsi dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lubis et al. (2005) bahwa fasilitas penting adalah fasilitas yang penting diperlukan agar pelabuhan perikanan (PP) dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dapat berfungsi dengan baik, namun realisasinya dapat ditunda.

Fasilitas pelengkap memiliki persentase terendah (70%). Lubis et al. (2005) menyatakan bahwa fasilitas pelengkap merupakan fasilitas yang diperlukan agar pelabuhan perikanan dapat berfungsi baik. Pernyataan tersebut menjadi alasan mengapa ada beberapa fasilitas yang belum ada di PPP Lampulo.

PPP Lampulo tidak memiliki tiga fasilitas pelengkap (dermaga muat terpisah, rumah dinas, dan mobil dinas) sehingga persentasenya menjadi 70%. Belum adanya 30% fasilitas pelengkap di PPP Lampulo disebabkan karena keterbatasan modal dan lahan. Pengelola PPP Lampulo lebih mengutamakan perbaikan dan pengembangan fasilitas yang diperlukan sehingga nantinya keberadaannya akan berguna.

Kategori mendekati baik diperoleh fasilitas pelengkap dimana dari keberadaan kelompok fasilitas ini yang seharusnya ada 10, ternyata hanya ada 7 fasilitas pelengkap (Gambar 8). Namun demikian, penilaian mendekati baik terhadap fasilitas pelengkap di PPP Lampulo tidak terlalu mempengaruhi dikarenakan fasilitas pelengkap belum terlalu diperlukan keberadaannya dibandingkan fasilitas vital dan penting. Selain itu, pengadaannya dapat dilakukan pada tahap ketiga setelah dua kelompok fasilitas lainnya terpenuhi serta ketiadaannya tidak terlalu menghambat aktivitas kepelayaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PPP Lampulo telah berkembang dengan baik karena hasil perolehan kategori fasilitas vital dan penting. Dari keseluruhan jumlah fasilitas yang ada di PPP Lampulo yaitu fasilitas

Tabel 1 Matriks keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo

Keberadaan Fasilitas	Kebutuhan Fasilitas			
	ADP	ANBP	BANP	BANBP
Ada

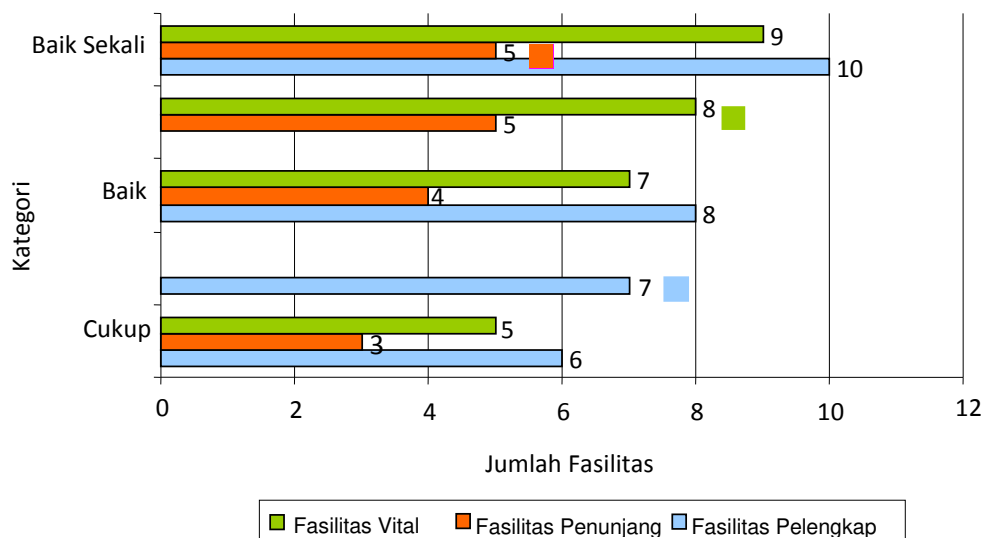
Tidak Ada

Ket: ADP = Ada dan diperlukan; ANBP = ada namun belum diperlukan; dan BANP = belum ada namun diperlukan; BANBP = Belum ada namun belum diperlukan (Novianti, 2008)

Tabel 2 Keberadaan fasilitas di PPP Lampulo

No.	Kelompok Fasilitas	Fasilitas	Keberadaan Fasilitas	
			Ada	Tidak Ada
1	Vital	Dermaga pendaratan ikan dan muat	■■■■■	
2		Kolam pelabuhan	■■■■■	
3		Sistem rambu-rambu		■■■■■
4		Tempat pelelangan ikan (TPI)	■■■■■	
5		Pabrik es	■■■■■	
6		Tangki dan instalasi air	■■■■■	
7		Tempat penyediaan bahan bakar	■■■■■	
8		Bengkel reparasi kapal	■■■■■	
9		Kantor administrasi	■■■■■	
		Jumlah	8	1
		Persentase (%)	88,89	11,11
1	Penting	Generator listrik	■■■■■	
2		Kantor kepala pelabuhan	■■■■■	
3		Tempat parkir	■■■■■	
4		Pos penghubung radio (SSB)	■■■■■	
5		Ruang pengepakan	■■■■■	
		Jumlah	5	-
		Persentase (%)	100	-
1	Pelengkap	Dermaga muat terpisah		■■■■■
2		Slipway	■■■■■	
3		Ruang pertemuan	■■■■■	
4		Toilet	■■■■■	
5		Pos penjagaan	■■■■■	
6		Balai pertemuan nelayan	■■■■■	
7		Rumah dinas		■■■■■
8		Mushola	■■■■■	
9		Mobil dinas		■■■■■
10		Motor Dinas	■■■■■	
		Jumlah	7	3
		Persentase (%)	70	30

Sumber : PPP Lampulo, 2009 (data diolah kembali)



Gambar 8 Kategori yang telah ditetapkan berdasarkan keberadaan fasilitas yang ada (■ ■ ■) di PPP Lampulo

vital, penting, dan pelengkap dapat diketahui kategorinya antara mendekati baik sampai baik sekali.

Kondisi fasilitas di PPP Lampulo

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan (PP) yang juga perlu mendapat perhatian selain keberadaannya juga kondisi dari fasilitas tersebut. Kondisi dari tiap fasilitas yang baik atau layak pakai akan menentukan seberapa besar dari jenis fasilitas tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna secara optimal dalam menjalankan fungsinya.

Tabel 3 berisikan kondisi fasilitas yang ada di PPP Lampulo. Kelompok fasilitas vital memiliki persentase 77,78% dengan kondisi layak pakai dan 22% melampaui kapasitas. Fasilitas yang melampaui kapasitas adalah tempat pelelangan ikan (TPI) dan kantor administrasi. TPI yang ada di PPP Lampulo sudah tidak dapat menampung ikan yang akan dijual, sehingga nelayan melakukan penjualan hasil tangkapan di pelataran dermaga yang mengakibatkan terhambatnya proses pengangkutan ikan dari dermaga ke TPI.

Kantor administrasi juga sudah melampaui kapasitas sehingga diperlukan perluasan agar memperlancar pengawasan administrasi. PPP Lampulo memiliki hampir keseluruhan fasilitas vital kecuali sistem rambu-rambu navigasi pelayaran. Rambu-rambu navigasi yang sedang dalam tahap proses pengadaan ini sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas pelayaran.

Kelompok fasilitas penting terdiri dari 96% kondisinya layak pakai dan 4% melampaui kapasitas (Tabel 4 dan Gambar 9). Fasilitas penting yang melampaui kapasitas adalah tempat parkir yang terletak di dalam dan di luar pagar tempat kapasitas karena lahan tempat parkir yang ada sudah tidak dapat lagi menampung jumlah kendaraan dalam jumlah banyak sehingga sering terjadi kesemerawutan.

Kelompok fasilitas pelengkap yang secara tidak langsung menunjang kelancaran fungsi pelabuhan perikanan memiliki kondisi layak pakai sebesar 54% dan tidak dapat digunakan 46%. Terdapat tiga fasilitas pelengkap yang tidak dimiliki oleh PPP Lampulo yaitu dermaga muat pisah, rumah dinas, dan mobil dinas. Fasilitas toilet di PPP Lampulo sudah tidak dapat digunakan (46%) dan pihak pelabuhan sudah memprogramkan untuk segera memperbaiki fasilitas ini.

Kondisi fasilitas di PPP Lampulo pada kelompok fasilitas vital berada di kategori baik dengan persentasenya yaitu 77,78% untuk kondisi layak pakai dan 22% untuk kondisi melampaui kapasitas. Penilaian kategori fasilitas vital sangat mempengaruhi perolehan kategori secara umum di PPP Lampulo, dikarenakan kondisi kelompok fasilitas vital memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi dalam mendukung aktivitas-aktivitas PPP Lampulo seperti pendaratan dan penjualan hasil tangkapan. Ketiadaan salah satu fasilitas vital yang seharusnya ada di PPP Lampulo harus segera direalisasikan karena fasilitas ini merupakan fasilitas mutlak yang diperlukan pelabuhan perikanan. Selain itu, juga pada fasilitas vital yang

sudah melampaui kapasitas memerlukan perbaikan agar aktivitas pelabuhan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan kondisinya, fasilitas penting 96% layak pakai dan 4% melampaui kapasitas sehingga termasuk pada kategori baik sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa PPP Lampulo telah memiliki hampir sebagian besar fasilitas penting walaupun masih ada fasilitas yang sudah melampaui kapasitas yaitu tempat parkir. Fasilitas ini memerlukan perluasan agar tidak mengganggu aktivitas lainnya.

Kondisi dari fasilitas pelengkap tidak dapat diabaikan begitu saja, dikarenakan peran dari kelompok fasilitas pelengkap juga ikut membantu melancarkan aktivitas di PPP Lampulo, walaupun tidak sebesar kelompok fasilitas vital dan penting. Di PPP Lampulo, kelompok fasilitas pelengkap hanya berada dalam kategori cukup karena masing-masing memiliki 54% dan 46% pada kondisi layak pakai dan tidak dapat digunakan. Walaupun fasilitas pelengkap

pengadaannya dapat direalisasikan setelah fasilitas vital dan penting terpenuhi, namun fasilitas pelengkap ini juga diperlukan di PPP Lampulo seperti contohnya slipway. Slipway diperlukan untuk memperbaiki kapal, membersihkan teritip, dan lainnya.

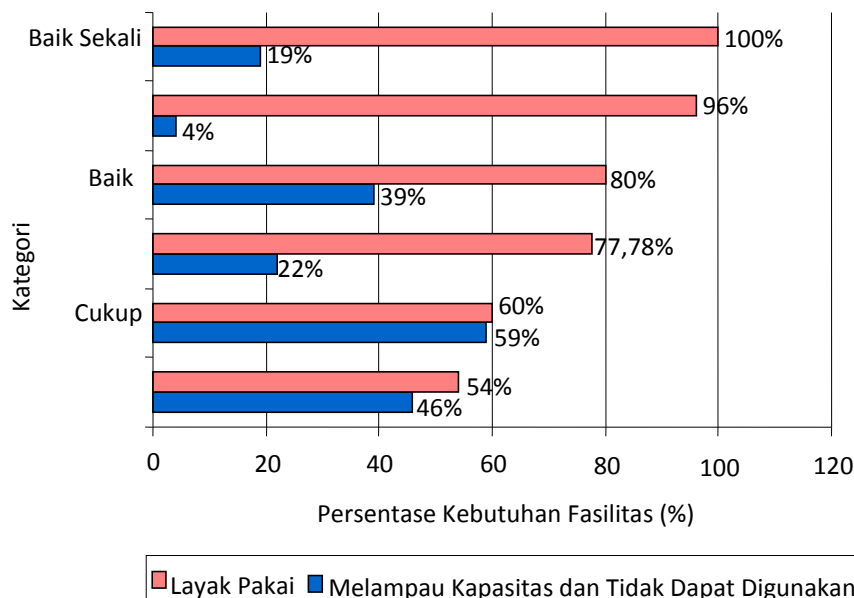
Dari kategori yang diperoleh per kelompok fasilitas dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi fasilitas di PPP Lampulo berada pada kategori baik. Hal ini didasarkan pada kondisi kelompok fasilitas vital yang menjadi acuan utama dalam memperoleh kategori baik walaupun kondisi kelompok fasilitas pelengkap mendapat kategori cukup. Namun demikian, penetapan baik ini didukung oleh perolehan dari kelompok fasilitas vital dan penting yang masing-masing berada pada kategori baik dan baik sekali sehingga hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo adalah baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keberadaan (dibahas pada bab sebelumnya) dan kondisi fasilitas berada pada kategori baik.

Tabel 3 Kondisi fasilitas di PPP Lampulo

No.	Fasilitas	Jenis Fasilitas	Kondisi Fasilitas		
			LP	MK	TDG
1	Vital	Dermaga pendaratan ikan dan muat	████████		
2		Kolam pelabuhan	████████		
3		Sistem rambu-rambu	████████████████████		
4		Tempat pelelangan ikan (TPI)		████████	
5		Pabrik es	████████		
6		Tangki dan instalasi air	████████		
7		Tempat penyediaan bahan baker	████████		
8		Bengkel reparasi kapal	████████		
9		Kantor administrasi	████████	████████	
		Jumlah	7	2	-
		Persentase (%)	77,78	22	-
1	Penting	Generator listrik	████████		
2		Kantor kepala pelabuhan	████████		
3		Tempat parkir	████████	████████	
4		Pos penghubung radio (SSB)	████████		
5		Ruang pengepakan	████████		
		Jumlah	23	1	-
		Persentase (%)	96	4	-
1	Pelengkap	Dermaga muat terpisah	████████████████████		
2		Slipway	████████		
3		Ruang pertemuan	████████		
4		Toilet			████████
5		Pos penjagaan	████████		
6		Balai pertemuan nelayan	████████		
7		Rumah dinas	████████████████████		
8		Mushola	████████		
9		Mobil dinas	████████████████████		
10		Motor Dinas	████████		
		Jumlah	7	-	6
		Persentase (%)	54	-	46

Tabel 4 Kondisi per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh di PPP Lampulo

Kategori	K O N D I S I F A S I L I T A S	
	Vital; Penting; Pelengkap	
	Layak Pakai	Melampaui Kapasitas dan Tidak dapat digunakan
Baik Sekali	81 - 100 % 96%	0 - 19 % 4%
Baik	61 - 80 % 77,78%	20 - 39 % 22%
Cukup	41 - 60 % 54%	40 - 59 % 46%
Buruk	21 - 40 %	60-79 %
Buruk Sekali	0 - 20 %	80 - 100 %



Gambar 9 Kondisi per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh di PPP Lampulo

Keberadaan, kebutuhan dan kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo

Aktivitas di suatu pelabuhan perikanan sangat erat kaitannya dengan keberadaan, kebutuhan, dan kondisi fasilitas. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui fasilitas yang seharusnya ada dan yang ada serta kebutuhan dan kondisi fasilitas yang dapat menunjang aktivitas-aktivitas di PPP Lampulo salahsatunya aktivitas pendaratan.

Proses aktivitas pendaratan ikan

Proses pendaratan ikan diawali dengan pembongkaran, penyortiran, dan pengangkutan ke TPI. Kapal-kapal yang sudah merapat ke dermaga segera melakukan proses pembongkaran (Gambar 10). Di PPP Lampulo, aktivitas

pendaratan ikan oleh kapal-kapal penangkapan ikan dilakukan dua kali yaitu pagi antara pukul 06.00-08.00 WIB dan sore antara pukul 18.00-20.00 WIB.

Dermaga yang ada hanya dapat memuat 10 unit kapal perhari untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Kecilnya ukuran dermaga mengakibatkan proses pendaratan ikan kurang berjalan lancar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dermaga sudah tidak cukup untuk melayani kegiatan pendaratan sehingga kapal-kapal tersebut harus mengantri dan bersandar secara berlapis di kolam pelabuhan.

Ketika hasil tangkapan yang disimpan di dalam palka telah selesai dikeluarkan, selanjutnya dilakukan penyortiran menurut ukuran

dan jenis ikannya. Nelayan menyimpan hasil tangkapannya tidak hanya dalam palka saja tetapi juga menyimpannya di dalam fiber, kotak *styrofoam*, dan di dalam ember. Hasil tangkapan yang disortir hanya sebagian saja karena sebagian ikan lainnya telah disortir ketika masih berada di kapal.

Selanjutnya ikan yang telah disortir dimasukkan ke dalam keranjang yang dapat disewa dengan harga Rp500,00/keranjang. Keranjang tersebut bisa menampung sampai 25 kg ikan. Kemudian masing-masing keranjang tersebut disusun di atas "grek" (kereta sorong) untuk selanjutnya dibawa ke TPI. Setelah sampai ke TPI, ikan yang telah disortir diserahkan kepada "toke bangku". Dengan demikian, bukan nelayan sendiri yang menjual hasil tangkapannya melainkan "toke bangku". Hal ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun di PPP Lampulo, "toke bangku" yang menjualkan hasil tangkapan nelayan.

Tabel 5 menunjukkan keberadaan fasilitas (*seharusnya ada* dan *ada*) dengan kebutuhan fasilitas (ADP, ANBP, BANP, dan BANBP) yang sangat menunjang aktivitas pendaratan ikan di PPP Lampulo. Di PPP Lampulo, aktivitas pendaratan juga memanfaatkan fasilitas keranjang dan "grek" (kereta sorong). Fasilitas ini digunakan oleh nelayan ketika mengangkut hasil tangkapan yang telah dibongkar dan disortir oleh nelayan. Meskipun fungsi fasilitas keranjang dan "grek" tidak terlalu vital tetapi keberadaannya sangat membantu dalam melancarkan aktivitas pendaratan ikan.

PPP Lampulo hanya memiliki 2 (dua) kelompok fasilitas vital dari 3 (tiga) yang seharusnya ada dan tingkat kebutuhan fasilitas ada dan diperlukan (ADP) dalam menunjang aktivitas pendaratan. Fasilitas sistem rambu-rambu navigasi memiliki tingkat kebutuhan belum ada namun diperlukan (BANP). Kelompok fasilitas penting yang seharusnya ada dalam mendukung aktivitas pendaratan ikan adalah pos penghubung radio SSB. Pada kelompok fasilitas pelengkap, PPP Lampulo tidak memiliki dermaga muat terpisah yang seharusnya ada sehingga fasilitas tersebut termasuk belum ada namun diperlukan.

Gambar 11 menunjukkan kategori baik untuk keberadaan fasilitas vital. Fasilitas yang seharusnya ada namun tidak dimiliki oleh PPP Lampulo adalah sistem rambu-rambu navigasi. Selain itu, keberadaan fasilitas penting di PPP Lampulo berada dalam kategori baik sekali atau fasilitas untuk kebutuhan aktivitas pendaratan sudah hampir terpenuhi. Fasilitas pelengkap mendapat kategori buruk sekali karena tidak ada fasilitas dermaga muat terpisah. Fasilitas

dengan tingkat keberadaan yang belum ada namun dari segi kebutuhan diperlukan adalah dermaga muat yang terpisah dengan dermaga bongkar. Fasilitas dermaga muat terpisah ini diperlukan agar aktivitas pembongkaran ikan tidak menyatu dengan aktivitas muat perbekalan sehingga tidak terjadi kesemerawutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat keberadaan fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan di PPP Lampulo berada dalam kategori baik dengan mengacu pada perolehan kategori per kelompok fasilitas.

Kelompok fasilitas vital memperoleh kategori baik atau 67% untuk kebutuhan fasilitas yang ada dan diperlukan dan 33% kebutuhan fasilitas belum ada namun diperlukan. Fasilitas penting yaitu pos penghubung radio SSB memperoleh angka 100% (baik sekali) untuk kebutuhan fasilitas ada dan diperlukan pada aktivitas pendaratan ikan. Fasilitas pelengkap termasuk kategori buruk sekali atau terdapat fasilitas yang belum ada namun diperlukan yaitu fasilitas dermaga muat terpisah (Gambar 12).

Kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan

Aktivitas di PPP Lampulo dapat berjalan dengan baik jika keberadaan fasilitas dalam kondisi yang baik. Tabel 6 di bawah ini menunjukkan kondisi dari tiap kelompok fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan.

Dari semua fasilitas vital yang ada untuk kebutuhan pendaratan ikan, dermaga pendaratan ikan dan muat serta kolam pelabuhan pada kelompok fasilitas vital memiliki kategori baik (67% kondisi layak pakai). Namun demikian, meskipun sampai saat ini keberadaan sistem rambu-rambu tidak ada pada kelompok fasilitas vital dalam menunjang aktivitas, pendaratan ikan masih berjalan lancar. Hal ini tidak berarti sistem rambu-rambu tidak diperlukan tetapi pengadaannya harus segera direalisasikan agar jaminan keselamatan pelayaran keluar masuk pelabuhan dapat terjamin.

Fasilitas penting 100% pada kondisi layak pakai atau kategori baik sekali (Gambar 13). Kelompok fasilitas pelengkap yang menunjang aktivitas pendaratan ikan tidak dapat diketahui kondisinya karena ketiadaan fasilitas tersebut di PPP Lampulo.

Rasio antara keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo

Keberadaan fasilitas merupakan tolok ukur perkembangan di suatu pelabuhan peri-

kanan dan juga sangat berperan penting dalam menunjang segala aktivitas. Kapasitas dan jenis fasilitas-fasilitas yang ada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan skala usaha perikanan. Fasilitas-fasilitas tersebut selanjutnya akan berkembang sesuai dengan kemajuan usaha perikanan. Berkembangnya fasilitas-fasilitas tersebut dapat berarti bertambahnya fasilitas baru dan atau bertambahnya kapasitas dari fasilitas yang telah ada. Dengan kata lain jenis dan kapasitas fasilitas yang ada berkembang sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan (Lubis, 2006).

Dari ke-24 fasilitas yang harus ada di suatu pelabuhan perikanan, PPP Lampulo memiliki 20 jenis fasilitas yang terdiri dari 8 fasilitas vital, 5 fasilitas penting, dan 7 fasilitas pelengkap (Tabel 7).

Kapasitas fasilitas pelabuhan harus disesuaikan dengan aktivitas yang ada. Misalnya, luas kolam pelabuhan harus cukup menampung kapal yang tambat labuh setiap harinya. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang guna menentukan tingkat kebutuhan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Di PPP Lampulo, pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas pelabuhan terus dilakukan guna meningkatkan pelayanannya.

Fasilitas yang diperlukan dan belum ada di PPP Lampulo diharapkan kepada pihak pelabuhan agar dapat segera direalisasikan pembangunannya sehingga aktivitas pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Lubis (2006) bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tidak harus ada semuanya di suatu pelabuhan, tetapi fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Sebagai contoh, ada kalanya suatu pelabuhan tidak memerlukan *cold storage* karena ikan-ikan yang didaratkan semuanya habis terjual dalam bentuk segar. Dengan demikian pengembangan pelabuhan perikanan harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhannya.

Menurut Lubis (2007), bahwa pemanfaatan pelabuhan perikanan adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas pelabuhan perikanan yang ada seefektif dan seefisien mungkin untuk menjalankan aktivitas kepelabuhanan secara optimal. PPP Lampulo yang belum memiliki semua fasilitas yang seharusnya ada di suatu pelabuhan perikanan, tetapi sudah dapat menjalankan aktivitas pelabuhan dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Meskipun be-

gitu, fasilitas yang belum ada akan segera dipenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 14 menunjukkan perbandingan kebutuhan fasilitas yang ada dan diperlukan dengan kebutuhan fasilitas ada namun belum diperlukan serta belum ada namun diperlukan. Di PPP Lampulo, fasilitas yang kebutuhannya belum ada namun diperlukan (BANP) adalah sistem rambu-rambu, dermaga muat terpisah, dan mobil dinas. Fasilitas sistem rambu-rambu harus segera direalisasikan pengadaannya mengingat fasilitas ini dibutuhkan untuk mengatur alur masuk kapal, menghindari tabrakan, dan jaminan keselamatan pelayaran.

Berdasarkan hasil perhitungan (Tabel 8) ini memperlihatkan bahwa keberadaan fasilitas yang ada di PPP Lampulo dapat disimpulkan berada pada kategori baik dengan masing-masing kelompok fasilitas vital (88,89%), penting (100%), dan pelengkap (70%). Fasilitas yang ada di pelabuhan ini dapat dimanfaatkan semuanya dan hal ini terlihat dari tidak adanya fasilitas yang ada namun belum diperlukan (ANBP).

Dari Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keberadaannya PPP Lampulo telah dapat menunjang seluruh aktivitasnya dengan baik. Rasio antara kebutuhan fasilitas yang belum ada namun diperlukan (BANP) terhadap keberadaan fasilitas yang seharusnya ada dimasing-masing kelompok fasilitas vital dan pelengkap termasuk kategori baik sekali dan baik, meskipun belum dimilikinya sistem rambu-rambu pada kelompok fasilitas vital. Hal ini perlu segera direalisasikan agar kelancaran dan keselamatan pelayaran terjamin.

Hal ini juga menunjukkan bahwa diantara fasilitas yang seharusnya ada masih terdapat fasilitas yang sebenarnya diperlukan namun belum tersedia. Jika semakin besar persentase yang diperoleh untuk kebutuhan fasilitas BANP maka akan semakin buruk kategori yang didapatkan.

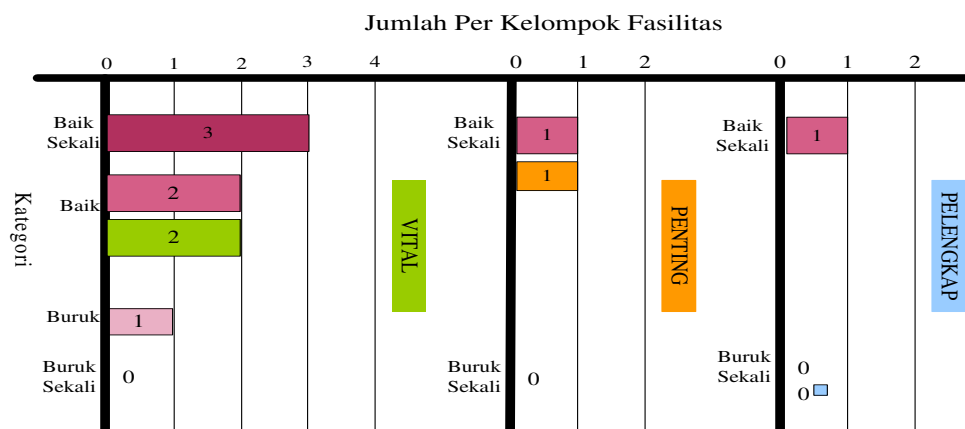
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi keberadaan dan kebutuhan fasilitas berdasarkan nilai rasio yang diperoleh di PPP Lampulo maka segala aktivitas di PPP Lampulo sudah dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada fasilitas-fasilitas yang belum tersedia dan harus diperbaiki dan serta ditambah kapasitasnya.

KESIMPULAN

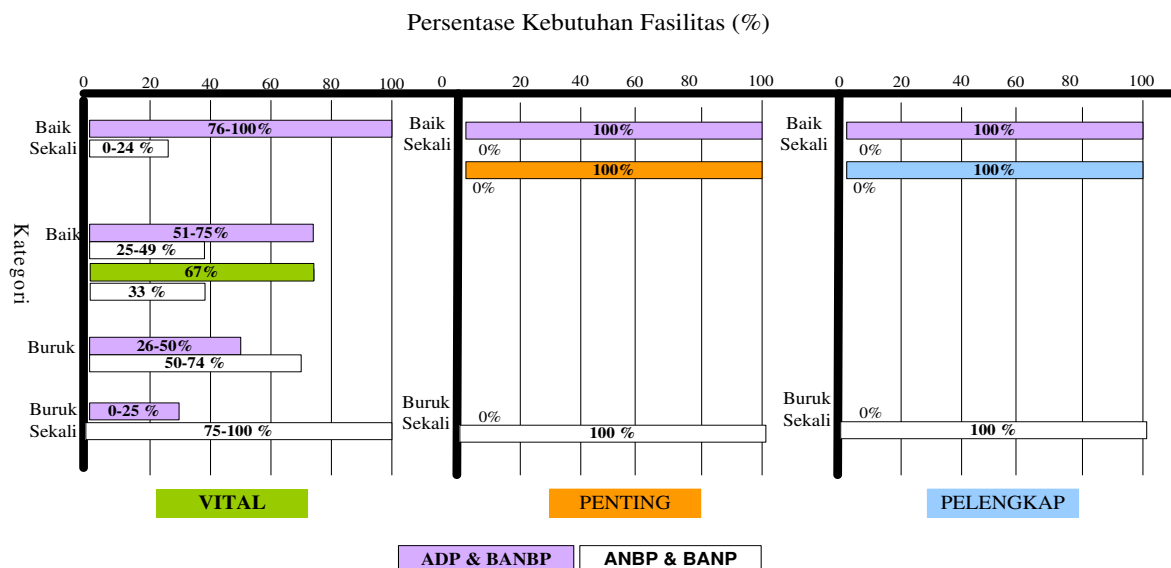
Dari hasil pengamatan di lapangan dapat disimpulkan yaitu tingkat keberadaan fasilitas



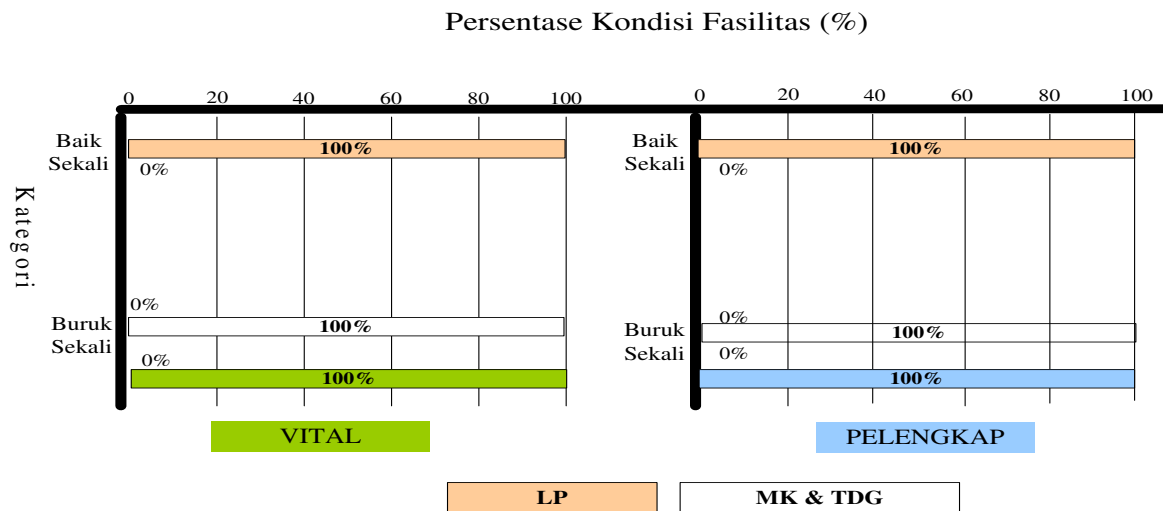
Gambar 10 (a) Aktivitas pembongkaran ikan tanpa disortir dan (b) Hasil tangkapan ikan yang sudah disortir



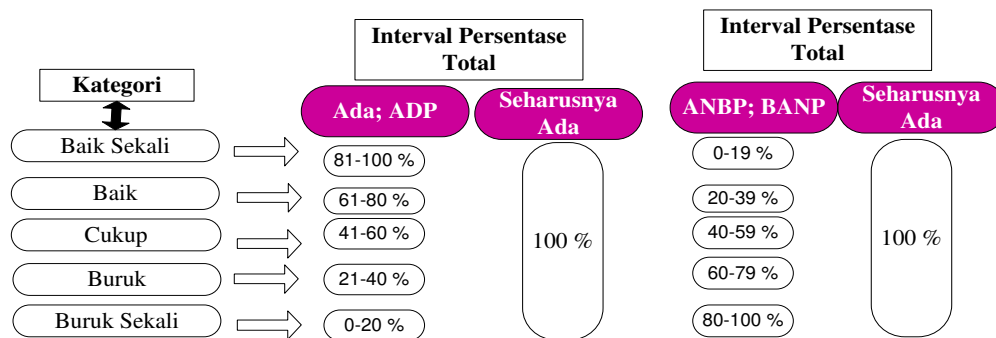
Gambar 11 Kategori yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah fasilitas yang seharusnya ada (■) dan yang diperoleh (■) dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan.



Gambar 12 Kebutuhan per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh (■) dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan.



Gambar 13 Kondisi per kelompok fasilitas dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan persentase yang diperoleh () dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan



Gambar 14 Skema pembagian interval persentase fasilitas per kategori untuk masing-masing kelompok fasilitas yang telah ditetapkan untuk seluruh aktivitas

Tabel 5 Keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan

No.	Kelompok Fasilitas	Fasilitas	Keberadaan Fasilitas		Kebutuhan Fasilitas			
			Seharusnya Ada	Ada	ADP	ANBP	BANP	BANBP
1	Vital	Dermaga pendaratan ikan & muat	██	██	██			
2		Kolam pelabuhan	██	██	██			
3		Sistem rambu-rambu navigasi	██				██	
		Jumlah	3	2	2		1	
		Persentase (%)	100	67	67		33	
1	Penting	Pos penghubung radio SSB	██	██	██			
		Jumlah	1	1	1			
		Persentase (%)	100	100	100			
1	Pelengkap	Dermaga muat terpisah	██				██	
		Jumlah	1				1	
		Persentase (%)	100				100	

Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara 2009

Ket: ADP: ada dan diperlukan; ANBP: ada namun belum diperlukan; BANP: belum ada namun diperlukan; BANBP: belum ada namun belum diperlukan.

Tabel 6 Kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas pendaratan ikan

No.	Kelompok Fasilitas	Jenis Fasilitas	Kondisi Fasilitas		
			Layak Pakai (LP)	Melampaui Kapasitas (MK)	Tidak dapat Digunakan (TDG)
1	Vital	Dermaga pendaratan ikan & muat	■		
2		Kolam pelabuhan	■		
3		Sistem rambu-rambu navigasi	■		
		Jumlah	2		
		Persentase (%)	67		
1	Penting	Pos penghubung radio (SSB)	■		
		Jumlah	1		
		Persentase (%)	100		
1	Pelengkap	Dermaga muat terpisah	■		
		Jumlah			
		Persentase (%)			

Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara 2009

Ket : ■ : Fasilitas ada; ■ : Fasilitas tidak ada

Tabel 7 Keberadaan dan kebutuhan seluruh fasilitas di PPP Lampulo

No.	Kelompok Fasilitas	Fasilitas	Keberadaan Fasilitas		Kebutuhan Fasilitas			
			Seharusnya Ada	Ada	ADP	ANBP	BANP	BANBP
1	Vital	Dermaga pendaratan ikan dan muat	■	■	■			
2		Kolam pelabuhan	■	■	■			
3		Sistem rambu-rambu	■				■	
4		Tempat pelelangan ikan (TPI)	■	■	■			
5		Pabrik es	■	■	■			
6		Tangki dan instalasi air	■	■	■			
7		Tempat penyediaan bahan bakar	■	■	■			
8		Bengkel reparasi kapal	■	■	■			
9		Kantor administrasi	■	■	■			
		Jumlah	9	8	8		1	
		Persentase (%)	100	88,89	88,89		11,11	
1	Penting	Generator listrik	■	■	■			
2		Kantor kepala pelabuhan	■	■	■			
3		Tempat parkir	■	■	■			
4		Pos penghubung radio (SSB)	■	■	■			
5		Ruang pengepakan	■	■	■			
		Jumlah	5	5	5			
		Persentase (%)	100	100	100			
1	Pelengkap	Dermaga muat terpisah	■				■	
2		Slipway	■	■	■			
3		Ruang pertemuan	■	■	■			
4		Toilet	■	■	■			
5		Pos penjagaan	■	■	■			
6		Balai pertemuan nelayan	■	■	■			
7		Rumah dinas	■					■
8		Mushola	■	■	■			
9		Mobil dinas	■				■	
10		Motor Dinas	■	■	■			
		Jumlah	10	7	7		2	1
		Persentase (%)	100	70	70		20	10

Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara 2009

Ket: ADP: ada dan diperlukan; ANBP: ada namun belum diperlukan; BANP: belum ada namun diperlukan; BANBP: belum ada namun belum diperlukan

Tabel 8 Rasio antara keberadaan fasilitas dan kebutuhan fasilitas

		Kelompok Fasilitas		Rasio (KF:KbF)	Kategori
Ada	Seharusnya Ada (100%)	Vital	: 88,89	88,89 : 100 = 1 : 1,12	Baik
		Penting	: 100	100 : 100 = 1 : 1	Baik Sekali
		Pelengkap	: 70	70 : 100 = 1 : 1,43	Baik
ADP	Seharusnya Ada (100%)	Vital	: 88,89	88,89 : 100 = 1 : 1,12	Baik
		Penting	: 100	100 : 100 = 1 : 1	Baik Sekali
		Pelengkap	: 70	70 : 100 = 1 : 1,43	Baik
ANBP	Seharusnya Ada (100%)	Vital			
		Penting			
		Pelengkap			
BANP	Seharusnya Ada (100%)	Vital	: 11,11	11,11 : 100 = 1 : 9	Baik Sekali
		Penting			
		Pelengkap	: 20	20 : 100 = 1 : 5	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data 2009

Ket: ADP: ada dan diperlukan; ANBP: ada namun belum diperlukan; BANP: belum ada namun diperlukan; BANBP: belum ada namun belum diperlukan

di PPPP Lampulo sudah dalam kategori *baik*. Tingkat keberadaan, kebutuhan, dan kondisi fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPP Lampulo yaitu aktivitas pendaratan ikan termasuk dalam kategori *baik*. Rasio antara fasilitas yang ada dan diperlukan (ADP) terhadap fasilitas yang seharusnya ada pada kelompok fasilitas vital adalah *baik*, penting *baik sekali*, dan pelengkap *baik*. Rasio antara kebutuhan fasilitas yang ada namun belum diperlukan (ANBP) terhadap keberadaan fasilitas yang seharusnya ada tidak dimiliki oleh PPP Lampulo karena semua fasilitas yang ada di pelabuhan tersebut dapat dimanfaatkan. Rasio antara kebutuhan fasilitas yang belum ada namun diperlukan (BANP) terhadap keberadaan fasilitas yang seharusnya ada dimasing-masing kelompok fasilitas vital dan pelengkap termasuk kategori *baik sekali* dan *baik*. Pengadaan sistem rambu-rambu navigasi perlu segera direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Syamsul. 2004. Analisis kepuasan nelayan terhadap pelayanan tempat pendaratan ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Kota Banda Aceh. <http://www.elibrary.mb.ipb.ac.id/gdl.php>. [27 Juni 2008].

[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. Laporan Tahunan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2000. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.

[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2004. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.10/MEN/2004. Tentang Pelabuhan Perikanan. Jakarta. Departemen Kelautan dan Perikanan.

[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 16/MEN/2006. Tentang Pelabuhan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Djuned, T. 1992. Panglima Laôt dan Tanggung Jawabnya terhadap Lingkungan Laut Aceh. Laporan Penelitian. Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Aceh.

Lubis E. 2006. Buku 1: Pengantar Pelabuhan Perikanan. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Lubis E. 2007. Pemanfaatan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan. Bahan Kuliah S1. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor

Novianti. 2008. Keberadaan Fasilitas dalam Menunjang Aktivitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) TanjungSari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah [Skripsi]. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.